



Mulia Ditarik Parkir Rp5 Ribu

■ Pengunjung PMPS Keluhkan Tarif Tak Sesuai Karcis

YOGYA. TRIBUN- Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) baru akan dibuka, Jumat (2/11) besok. Namun beberapa *stand* yang sudah digelar, membuat warga memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke sana. Salah satunya adalah Mulia, warga luar kota yang mengaku cukup terkejut dengan tarif parkir dan tarif kuliner yang ada di PMPS.

"Saya ke sana malam minggu kemarin (27/10). Saya parkir di dekat TK-SD Pangudi Luhur. Diberi karcis, tulisannya Rp3 ribu. Sudah saya siapkan uang Rp3ribu ternyata ditarik Rp5 ribu," ucapnya kepada *Tribun Jogja*, Rabu (31/10).

Selanjutnya, ia yang datang bersama keluarganya tersebut menikmati beberapa wahana permainan yang sudah beroperasi. Ia juga menjajal kuliner di *stand* yang berada di sisi timur salah satu wahana permainan.

● ke halaman 19

Tarif parkir yang dikarcis tertera Rp3 ribu namun ditarik bayar Rp5 ribu

5.000

Penjual kuliner juga lakukan kecurangan dengan menaikkan harga minuman tak wajar

Forum Komunikasi Komunitas Alun-alun Utara mengajukan tarif khusus ke wali kota

Alasannya dari sisi operasional tarif parkir tarif pada Perda sudah tidak rasional

KELUHAN PARKIR SEKATEN

Pengunjung PMPS mengeluhkan kecurangan sejumlah tarif di area PMPS

Instansi	Nilai Berita	Sifat Berita
Dinas Perhubungan Kec. Gondomanan	<input checked="" type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat <input checked="" type="checkbox"/> Seges <input type="checkbox"/> Biasa

y diketahui

GRAPIS/FAUZIA RAHMAN

Mulia Ditarik Parkir

• Sambungan Hal 13

"Di menu tertera harga makanan mi ayam Rp8ribu dan bakso Rp10 ribu. Minumannya enggak ada keterangan harga. Begitu bayar ternyata es jeruk satu gelas harganya Rp7 ribu. Ya agak gimana juga," urainya.

Ia pun memberikan masukan kepada pengelola PMPS agar bisa lebih transparan dan menginformasikan kepada pengunjung, mulai dari parkir hingga harga yang ditawarkan di stand kuliner.

"Lalu baiknya juga ditata, misalkan wahana permainan semuanya di timur, barat yang jualan baju, selatan jualan makanan sehingga terlihat rapi dan mau cari makan jadi gampang," tandasnya.

Sekretaris Forum Komunikasi Komunitas Alun-alun Utara (FKKAU), M Krisnadi

menjelaskan, terdapat 20 titik parkir roda dua yang disediakan untuk pengunjung di ruas dalam Alun-Alun Utara.

"Tarif parkir masih sesuai perda, tapi kami sedang mengajukan permohonan tarif khusus ke Wali Kota, sekaligus untuk mengendalikannya kepadatan parkir motor di dalam," ujarnya.

Krisnadi menjelaskan, usulan tarif parkir tersebut terbagi menjadi tarif hari biasa dan tarif akhir pekan. Usulan tarif yang diajukan untuk Senin hingga Jumat sebesar Rp3 ribu, sementara untuk Sabtu dan Minggu sebesar Rp5 ribu.

"Semoga usulan ini disetujui wali kota. Pertimbangan tarif segitu adalah agar pengunjung bisa memilih parkir dalam atau luar, karena di dalam lahannya sempit," urainya.

Tak rasional

Selain itu, lanjutnya, dari sisi operasional tarif parkir, ia menganggap bahwa tarif pada perda sudah tidak

rasional. Selanjutnya luas satuan ruang parkir dan tenaga kerja tidak sebanding dengan tarif resmi.

"Parkir PMPS bukan seperti parkir umum, di tempat kami tidak model juraga atau perusahaan. Ini murni dikelola oleh warga sekitar alun-alun," ucapnya.

Ia pun menjelaskan bahwa tiap titik parkir tersebut membuat karcis masing-masing dengan mencantumkan besaran tarif. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan monitoring saat terjadi pelanggaran tarif parkir di titik tertentu.

"Setiap titik parkir bikin karcis masing-masing sekaligus untuk identifikasi ketika ada kelompok yang melanggar ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Camat Gondomanan Agus Arif menjelaskan bahwa parkir yang dikelola kecamatan berada di dalam Alun-Alun.

Tarifnya sesuai perda yakni Rp2 ribu. Sebenarnya bisa progresif tapi mekanismenya sulit karena kami

enggak ada alatnya. Padahal pengunjung di PMPS ini lebih dari 2-3 jam," bebarnya.

Ia pun menegaskan tidak akan menabrak aturan yang berlaku di perda. Namun ia tak menutup mata, bahwa komunitas sekitar yang mengelola parkir juga merasakan kendala dalam menata parkir PMPS.

"Teman-teman komunitas merasakan parkir PMPS masuknya Magrib dan pulang-pulang pukul 22.00. Kalau parkir TJU, beli bakmi misalkan, 30 menit sudah selesai. Jadi memang berbeda," tambahnya.

Ia juga menegaskan tidak ada penutupan jalan selama PMPS berlangsung. Kondisi yang akan diterapkan adalah pembatasan jenis kendaraan untuk menekan volume kendaraan yang lalu lalu di seputaran lokasi PMPS.

"Mengurangi volume kendaraan roda tiga ke atas. Tidak memungkinkan. Bukan menutup, tapi pembatasan. Kecuali penghuni atau emergency," tandasnya. (kur)

Pemkot Harus Menata

SEKRETARIS Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko menjelaskan parkir menjadi persoalan menahun saat penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS). Terlebih untuk tahun ini berbarengan dengan revitalisasi Malioboro yang membuat sekitar Kantor Pos yang dulunya bisa digunakan untuk parkir, saat ini sudah murni menjadi area pedestrian.

"Tumpuan utamanya bagaimana mengelola lahan parkir yang ada. Revitalisasi itu cukup membuat parkir berkurang, tadinya ada menjadi tidak ada. Depan BI (Bank Indonesia) juga ada toilet sehingga lahannya berkurang. Kami akan mengamati," tandasnya, Rabu (31/10).

Ia menambahkan, munculnya tarif parkir yang lebih tinggi dikarenakan keterbatasan lahan sehingga membuat juru parkir (jukir) nakal memaikan harga.

"Pemkot harus menata. Harus berani dan membuka area parkir di sekitar alun-alun. Misalkan ada lahan kosong, buatlah untuk parkir.

• ke halaman 19

Pemkot Harus Menata

• Sambungan Hal 13

Ceruk lainnya bisa koordinasi dengan pengurus wilayah untuk juga menjaga kenyamanan, keamanan, serta kewajaran

harga yang tidak merugikan wisatawan," tambahnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, bahwa warga sekitar juga bisa ikut meramaikan pelaksanaan PMPS tahun ini sebagai salah satu pelaku, yakni merelakan lahan atau halaman mereka untuk parkir pengunjung.

"Kalau warga sekitar yang punya usaha, ketika bisa sewa stand mereka akan langsung sewa stand. Sementara yang lain bisa memberdayakan lahan yang ada sebagai parkir, tapi tetap mengindahkan ketentuan tarif. Itu bisa jadi pemasukan kas warga," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005